



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

2023

Dinas Komunikasi, Informatika
dan Statistik Kota Blitar

Pemerintah Kota Blitar



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya Laporan Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfo) Kota Blitar dapat diselesaikan. Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang disusun berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun Anggaran 2023, serta Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dan merupakan bentuk akuntabilitas yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfo) Kota Blitar merupakan perwujudan bentuk akuntabilitas sebagai unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dimandatkan kepada Diskominfo Kota Blitar dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban secara periodik berupa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Laporan Kinerja ini baik tenaga dan pikirannya diucapkan terima kasih dan penghargaan yang tulus. Semoga Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Blitar ini dapat memberikan manfaat secara optimal.

Blitar, 28 Februari 2024

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

Kota Blitar



MUJIANTO S.Sos., M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 197202141992011003

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar yang didalamnya terdiri atas sekretariat dan 3 bidang, merupakan unsur dari Pemerintah Kota Blitar yang bertugas membantu kepala daerah (Walikota) dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Statistik dan bidang Persandian yang menjadi kewenangan daerah serta tugas pembantuan.

Sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun 2021-2026 yang di dalamnya memuat Visi dan Misi Pemerintah Kota Blitar, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar mengemban satu misi Pemerintah Kota Blitar, yaitu misi ke-5 (lima) **Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi.**

Dalam rangka mewujudkan Misi tersebut ditetapkan 1 (satu) Tujuan yaitu **Meningkatnya pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.** Tujuan ini kemudian dijabarkan ke dalam sasaran Rencana Strategis (RENSTRA), yaitu :

1. Meningkatnya layanan SPBE melalui kebijakan dan tata kelola TIK;
2. Meningkatnya Sistem Keterbukaan Informasi Publik;
3. Meningkatnya Pemanfaatan Data Statistik Daerah;
4. Meningkatnya Keamanan Informasi.
5. Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah

Laporan Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja sasaran strategis yang menjadi kinerja utama dengan dukungan kinerja program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama satu tahun anggaran 2023 oleh masing-masing bidang dari dana APBD Kota Blitar. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota

Blitar didukung dengan dana yang cukup memadai. Pada tahun 2023 jumlah anggaran belanja adalah sebesar Rp. **14.412.055.999,-**

Adapun penggunaan anggaran tersebut diperuntukkan sebagai upaya mewujudkan visi dan misi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar yang dituangkan dalam 5 (lima) program yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
3. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika;
4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
5. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi.

Secara keseluruhan pelaksanaan program penyelenggaraan pemerintahan pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar selama tahun anggaran 2023 menunjukkan kinerja yang **Sangat Berhasil** dengan ditandai oleh rata-rata capaian indikator kinerja utama Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar tahun 2023 dengan nilai 101,39% (*seratus satu koma tiga puluh sembilan persen*).

Blitar, 23 Februari 2023

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

Kota Blitar



MUJIANTO S.Sos.,M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 197202141992011003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	7
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. KEDUDUKAN , TUGAS POKOK DAN FUNGSI	2
1. TUGAS POKOK DAN FUNGSI	2
2. Susunan Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar terdiri dari:	3
C. MAKSUD DAN TUJUAN	4
1. MAKSUD	4
2. TUJUAN	5
D. DASAR HUKUM	5
E. ASPEK-ASPEK STRATEGIS	7
F. ISU-ISU STRATEGIS	9
BAB II	10
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	10
A. RENCANA STRATEGIS	10
B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023	12
BAB III	16
AKUNTABILITAS KINERJA	16
A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA/ SASARAN	16
1. Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Target Dan Realisasi 2023	19
2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021-2023	34
3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Akhir Periode Renstra	36
4. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Realisasi Nasional (Target SPM)	38

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN (Cost Per Outcome)	39
1. Menghitung Alokasi Per Tujuan Dan / Atau Sasaran Pembangunan	41
2. Menghitung Pencapaian Kinerja Dan Anggaran	42
3. Menghitung Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	46
C. Prestasi/ Penghargaan	48
BAB IV	49
PENUTUP	49
A. Kesimpulan	49
B. Langkah Perbaikan	50
LAMPIRAN I	52
LAMPIRAN II	159
Lampiran III	193
LAMPIRAN IV	196

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Isu- Isu Strategis	Error! Bookmark not defined.
Tabel 2.1 Indikator Kinerja Utama	13
Tabel 3.1 Kriteria Capaian Indikator Kinerja	17
Tabel 3.2 Pencapaian Kinerja	18
Tabel 3.3 Pengukuran Realisasi Kinerja Indikator Sasaran 1 Tahun 2023	20
Tabel 3.4 Data Jumlah Sistem Informasi sampai dengan Tahun 2023	21
Tabel 3.5 Pengukuran Realisasi Kinerja Indikator Sasaran 2 Tahun 2023	24
Tabel 3.6 Pengukuran Realisasi Kinerja Indikator Sasaran 3 Tahun 2023	25
Tabel 3.7 DAFTAR PERANGKAT DAERAH YANG MENGGUNAKAN DATA STATISTIK DALAM MENYUSUN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DI KOTA BLITAR PADA TAHUN 2023	27
Tabel 3.8 DAFTAR PERANGKAT DAERAH YANG MENGGUNAKAN DATA STATISTIK DALAM MENYUSUN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH DI KOTA BLITAR PADA TAHUN 2023	28
Tabel 3.9 Pengukuran Realisasi Kinerja Indikator Sasaran 4 Tahun 2023	29
Tabel 3.10 Tabel Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Target dan Realisasi Tahun 2023	33
Tabel 3.11 Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021-2023	34
Tabel 3.12 Perbandingan Kinerja sampai dengan Akhir Periode Renstra	36
Tabel 3.13 Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Realisasi Nasional (Target SPM)	38

Tabel 3. 14 TABEL ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA LANGSUNG	39
Tabel 3. 15 ALOKASI PER TUJUAN DAN / ATAU SASARAN PEMBANGUNAN	41
Tabel 3. 16 PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2023	42
Tabel 3. 17 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2023	46

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dengan berakhirnya satu tahun anggaran maka sudah menjadi kewajiban bagi penyelenggara negara untuk melaksanakan pelaporan sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan program dan kegiatan. Laporan kinerja merupakan penjelasan ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai bagian tidak terpisahkan dalam implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada institusi negara/ pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah Kepemerintahan yang baik bersih dan berwibawa (*Good Governance and Clean Government*) di Indonesia.

Laporan kinerja diperlukan sebagai pengukuran pelaksanaan kinerja institusi negara/ pemerintah sesuai dengan rencana strategis dan rencana kinerja yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar merupakan proses untuk menilai keberhasilan dan kegagalan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan renstra perangkat daerah dalam mewujudkan visi dan misi kepala daerah.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

ini diharapkan ke depannya dapat digunakan sebagai bahan evaluasi peningkatan kinerja instansi sekaligus menjadi tolok ukur dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU).

B. KEDUDUKAN , TUGAS POKOK DAN FUNGSI

1. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan dijabarkan lagi melalui Peraturan Walikota Blitar Nomor 25 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik

Kedudukan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang komunikasi, informatika, bidang statistik dan bidang persandian yang menjadi kewenangan daerah, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik mempunyai tugas membantu walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian yang menjadi kewenangan daerah serta tugas pembantuan. Untuk menjalankan tugas, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik melaksanakan tugas pokok dan fungsi:

- a. perumusan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi informasi dan komunikasi publik;

- b. perumusan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi aplikasi informatika;
- c. perumusan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi statistik sektoral di lingkup daerah kota;
- d. perumusan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi;
- e. pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja;
- f. pelaksanaan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD);
- g. penyelenggaraan keamanan, kebersihan, dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor;
- h. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- i. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- j. pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
- k. pengelolaan pengaduan masyarakat;
- l. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik secara berkala melalui sub domain website pemerintah daerah;
- m. pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik; dan

- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Susunan Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar terdiri dari:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang membawahi:
 - 1) Sub Bagian Program dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Umum , dan Keuangan.
- c. Bidang Informasi Komunikasi Publik
- d. Bidang Aplikasi Informatika
- e. Bidang Statistik dan Persandian
- f. Kelompok Jabatan Fungsional

Bagan Susunan Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik sebagai berikut :

Gambar 2.1



C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. MAKSUD

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini dimaksudkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan Tugas dan Fungsi serta memberikan informasi kinerja yang terukur pencapaian pelaksanaan sasaran strategis/ kinerja utama sesuai indikator yang telah ditetapkan. Laporan ini juga dimaksudkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Blitar.

2. TUJUAN

Tujuan disusunnya laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), yaitu :

1. Memberikan informasi guna penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang;
2. Sebagai bahan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang;
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar untuk meningkatkan kinerjanya;

D. DASAR HUKUM

Landasan hukum yang digunakan dalam menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
 12. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Blitar Tahun 2005 - 2025;

13. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026;
14. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun Anggaran 2023;
16. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun 2023;
17. Peraturan Walikota Blitar Nomor 68 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
18. Peraturan Walikota Blitar Nomor 25 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik
19. Peraturan Walikota Blitar Nomor 99 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Blitar Tahun 2022 – 2026;
20. Peraturan Walikota Blitar Nomor 101 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun Anggaran 2023;
21. Peraturan Walikota Blitar Nomor 44 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;

22. Peraturan Walikota Blitar Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 72 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023;
23. Peraturan Walikota Blitar Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun Anggaran 2023;
24. Peraturan Walikota Blitar Nomor 65 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026;

E. ASPEK-ASPEK STRATEGIS

Sebagai unsur penunjang, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar memiliki aspek-aspek strategis yang dapat menunjang dalam melaksanakan tugas dan fungsi perangkat daerah, diantaranya sebagai berikut:

1. Perumus kebijakan teknis dan pelaksana program urusan komunikasi dan informatika, urusan statistik dan urusan persandian
2. Pembina dan Pendamping Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), *Media Partner*, *Influencer*, Relawan TIK, SATU DATA Indonesia, Keterbukaan Informasi Publik, dan keamanan Informasi
3. Agenda Pembangunan dalam RPJMD 2021-2026 untuk meningkatkan kualitas sumber daya yang bersaing melalui penyediaan infrastruktur komunikasi, melakukan komunikasi publik dan mendeliver substansi terkait digitalisasi melalui sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

F. ISU-ISU STRATEGIS

Menjawab permasalahan-permasalahan pada tahun 2023 maka dapat dikemukakan isu-isu strategis pada Dinas Komunikasi, Informatika

dan Statistik Kota Blitar sebagai berikut:

1. Pengembangan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kota Blitar menuju terciptanya layanan umum dan administrasi pemerintahan yang sepenuhnya terdigital untuk mewujudkan smart city di Kota Blitar .
2. Pengembangan dan penguatan infrastruktur jaringan internet dan intranet Pemerintah Kota Blitar serta akses layanan internet untuk masyarakat guna mendukung digitalisasi di kota Blitar;
3. Pengembangan pemanfaatan layanan Data center dengan memanfaatkan pusat data nasional untuk meningkatkan keamanan dan integrasi data serta interoperabilitas sistem pemerintahan berbasis elektronik di Kota Blitar;
4. Pengembangan penyediaan informasi dan dokumentasi berbasis elektronik;
5. Pengembangan kelompok informasi masyarakat guna penyebaran, penyediaan dan pemanfaatan informasi, yang dilaksanakan oleh pemerintah secara aktif, mengumpulkan informasi yang bermanfaat untuk dapat diakses oleh masyarakat ;
6. Pengembangan layanan informasi publik melalui media Pemerintah daerah yang berkualitas yang dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah dan cepat.
7. Pengembangan layanan satu data melalui sistem pemerintahan berbasis elektronik;
8. Pengembangan pelayanan persandian dan keamanan

informasi seiring dengan pemanfaatan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

BAB II**PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA****A. RENCANA STRATEGIS**

Perencanaan adalah suatu upaya dalam menentukan berbagai hal yang hendak dicapai atau tujuan di masa depan dan juga untuk menentukan beragam tahapan yang memang dibutuhkan demi mencapai tujuan tersebut. Perlunya suatu perencanaan yang strategis untuk mencapai tujuan dimana rencana strategis merupakan suatu proses perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu. Rencana Strategis merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagai perwujudan Visi dan Misi Kepala Daerah. Di dalam Rencana Strategis ini termuat tujuan, sasaran dan program yang mengacu pada visi, misi, tujuan serta sasaran RPJMD Kota Blitar.

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan kinerja tujuan, sasaran, dan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Rencana Strategis (Renstra) merupakan bentuk komitmen organisasi dalam pencapaian kinerja sekaligus sebagai pedoman untuk :

1. Menyusun Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kinerja/ Penetapan Kinerja Tahunan dan Rencana Anggaran;
2. Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah(LKj IP);
3. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama lima tahun ke depan;
4. Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif dan efisien, berkeadilan dan berkelanjutan;
5. Untuk menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi dan sinergi antara Sekretariat dan Bidang-Bidang pada instansi pemerintah.

Dalam menjalankan tugas, pokok dan fungsinya, Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kota Blitar menjalankan Visi Kota Blitar *“Terwujudnya KOTA BLITAR KEREN : Unggul, Makmur, dan Bermartabat* pada Tahun 2021 – 2026 . Adapun Misi Kota Blitar tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut.

1. Meningkatkan Tata Kehidupan yang Religius, Nasionalis, Setara Gender dan Berkepribadian dalam Kebudayaan
2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Keren, Berdaya Saing, Sehat Jasmani-Rohani, Cerdas dan Berkarakter
3. Berdikari secara Ekonomi yang Berorientasi pada Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Perdagangan Berbasis Digital
4. Meningkatkan Infrastruktur dan Tata Ruang yang Berwawasan Lingkungan Hidup dan Berkeadilan
5. Meningkatkan Tata Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi

Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kota Blitar termasuk pada misi ke-5 RPJMD, yaitu “Meningkatkan Tata Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi”. Menjabarkan misi tersebut, Rencana Strategis (Renstra) mempunyai tujuan yaitu “Meningkatnya Pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik”. Tujuan ini kemudian dijabarkan ke dalam sasaran Rencana Strategis (RENSTRA), yaitu :

1. Meningkatnya layanan SPBE melalui kebijakan dan tata kelola TIK;
2. Meningkatnya Sistem Keterbukaan Informasi Publik;
3. Meningkatnya Pemanfaatan Data Statistik Daerah;
4. Meningkatnya Keamanan Informasi.
5. Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah

Adapun Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kota Blitar secara rinci dapat dilihat pada “Lampiran. I LKJIP 2023, Matriks Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kota Blitar Tahun 2021 - 2026 .

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Perjanjian Kinerja merupakan pernyataan komitmen pimpinan sebagai penerima amanah untuk mewujudkan janji mencapai kinerja tertentu yang telah disepakati bersama. Perjanjian Kinerja Tahun 2023 merupakan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu :

Tabel 2. 1 Indikator Kinerja Utama

NO	KINERJA UTAMA/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	TARGET 2023	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	$\frac{(\text{Bobot} \times \text{Domain Kebijakan SPBE}) + (\text{Bobot} \times \text{Domain Tata Kelola SPBE}) + (\text{Bobot} \times \text{Layanan SPBE})}{3}$	2,82	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar

No	KINERJA UTAMA/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	TARGET 2023	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya layanan SPBE melalui kebijakan dan tata kelola TIK	Persentase layanan publik online dan terintegrasi	Jumlah Layanan publik on line dan terintegrasi Jumlah layanan publik x 100 %	94%	Bidang Aplikasi Informatika
2	Meningkatnya sistem keterbukaan informasi publik	Nilai Hasil Monev PPID	Pemeringkatan monev Keterbukaan informasi publik (Berdasarkan Perki 5 Tahun 2016)	86	Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
3	Meningkatnya pemanfaatan data statistik daerah	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan dan evaluasi pembangunan	Jumlah OPD yang menggunakan data statistik utk perencanaan dan evaluasi pembangunan / jumlah OPD X 100%	97%	Bidang Statistik dan Persandian
4	Meningkatnya Keamanan Informasi	Indeks KAMI	Jumlah nilai per area keamanan informasi/Jumlah area penilaian x 100 %	46.51	Bidang Statistik dan Persandian

5	Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Kategori SAKIP PD berdasarkan evaluasi/penilaian dari Inspektorat Daerah Kota Blitar	A 85	Sekretariat
---	---------------------------------------	------------------------------	--	---------	-------------

Perjanjian kinerja tahun 2023 dimaksudkan sebagai komitmen dari Organisasi Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan diberikan anggaran sesuai kebutuhan. Dengan adanya perjanjian kinerja juga sebagai panduan dan arahan bagi OPD untuk memenuhi target yang ditetapkan dan pada akhirnya dapat mencapai target dari rencana strategis OPD.

Adapun Pernyataan Perjanjian dan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

**PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
KOTA BLITAR**



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUJIANTO, S.Sos, M.Si
Jabatan : KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
KOTA BLITAR
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. SANTOSO, M.Pd
Jabatan : Walikota Blitar
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Blitar, 2 Oktober 2023


 Drs. SANTOSO, M.Pd
 Walikota Blitar,


 MUJIANTO, S.Sos, M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 197202141992011003
 KEPALA DINAS KOMUNIKASI,
 INFORMATIKA DAN STATISTIK
 KOTA BLITAR Kota Blitar

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
KOTA BLITAR**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya sistem keterbukaan informasi publik	Nilai Hasil Monev PPID	86.00(Nilai)
2	Meningkatnya layanan SPBE melalui kebijakan dan tata kelola TIK	Persentase layanan publik online dan terintegritasi	94.00(Persen)
3	Meningkatnya pemanfaatan data statistik daerah	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan dan evaluasi pembangunan	97.00(Persen)
4	Meningkatnya Keamanan Informasi	Indeks KAMI	46.51(Indeks)
5	Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85.00(Nilai)

No	Program	Anggaran (Rp.)	Keterangan
1	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	6,372,423,052.00	Pendapatan Bagi Hasil
2	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2,418,788,250.00	Pendapatan Bagi Hasil
3	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	331,596,642.00	Pendapatan Bagi Hasil
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	183,560,732.00	Pendapatan Bagi Hasil
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5,105,687,323.00	Pendapatan Bagi Hasil

Blitar, 2 Oktober 2023


 Walikota Blitar,
Drs. SANTOSO, M.Pd


 KEPALA DINAS KOMUNIKASI,
 INFORMATIKA DAN STATISTIK
 KOTA BLITAR Kota Blitar
MUJIANTO, S.Sos, M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 197202141992011003

BAB III**AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi baik dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas. Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang dimaksud, yang ditetapkan dalam Rencana Strategis unit kerja untuk mewujudkan visi dan misi pemerintah daerah.

Dalam penyusunannya, laporan akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar dibuat berdasarkan ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA/ SASARAN

Pengukuran Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar diperoleh dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan realisasi yang dicapai. Sedangkan cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Dari pengukuran kinerja dapat dilihat gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari

masing - masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2021-2026 maupun Renja Tahun 2023

Pengukuran capaian kinerja tersebut dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi kinerja tahun 2023, realisasi kinerja tahun 2021 dengan realisasi kinerja tahun 2023. Adapun dalam memberikan penilaian tingkat realisasi kinerja setiap sasaran, menggunakan rumus sebagai berikut :

1. Tingkat Realisasi Positif

Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut:

Capaian n	=	Realisasi	x 100 %
		Target	

2. Tingkat realisasi negatif

Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah, maka digunakan rumus sebagai berikut :

Capaian n	=	Realisasi – (Realisasi – Target)	x 100 %
		Target	

Dengan kriteria penilaian pada capaian masing – masing indikator kinerja adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 1 Kriteria Capaian Indikator Kinerja

No	Nilai Capaian Kinerja	Pemberian Atribut
----	-----------------------	-------------------

	%	Keterangan Persentase	
1.	85 % s.d 100 %	Delapan puluh lima persen sampai dengan seratus persen	Sangat Berhasil
2.	70 % s.d < 85 %	Tujuh puluh persen sampai dengan kurang dari delapan puluh lima persen	Berhasil
3.	55 % s.d < 70 %	Lima puluh lima persen sampai dengan kurang dari tujuh puluh persen	Cukup Berhasil
4.	< 55 %	Di bawah lima puluh lima persen	Tidak Berhasil

Pengukuran Realisasi Kinerja Tahun 2023 Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kota Blitar dapat dilihat pada tabel berikut :

Tujuan : Meningkatnya pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Tabel 3. 2 Pencapaian Kinerja

Tujuan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Meningkatnya pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik	2,82	3,68	130,50%

Analisis : Capaian Indeks SPBE Tahun 2023 Pemerintah Kota Blitar 3,68. Mengalami kenaikan jika dibandingkan tahun 2022 yaitu sebesar 2,81 Indikator Tujuan pada tahun 2023 dengan capaian 130,50%.

Adapun kenaikan dari hasil Indeks SPBE tersebut karena adanya kenaikan pada domain, yang terdiri dari 47 indikator adapun untuk mencapai tingkat kematangan dari masing masing indikator diperlukan kerja sama dari Pihak Eksternal maupun Pihak Internal Dinas Kominfotik. Pihak Eksternal meliputi Badan Dinas dan Bagian yang berada di Pemerintah Kota Blitar urutkan (Bappeda, BKPSDM, BPKAD, Inspektorat, Dinas Kesehatan, Dispendukcapil, Disperpusip, DPM PTSP, Dinas Pendidikan, DP3AKB, Dinas Sosial, Bagian Hukum, Bagian Organisasi, BLP, Bagian Tata Pemerintahan).

Adapun Pihak Internal selain Bidang Aplikasi Informatika juga di dukung oleh 2 Bidang lainnya yaitu Bidang Statistik Persandian yang mengampu 8 Indikator terdiri dari :

- Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Data
- Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi
- Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Audit TIK (Audit mencakup aplikasi, infrastruktur dan keamanan)
- Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko SPBE
- Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi
- Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data
- Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE
- Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka

Sementara untuk Bidang Informasi komunikasi Publik mengampu pemenuhan Indikator Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik.

Beberapa kegiatan yang dilaksanakan Tahun 2023 untuk mendukung capaian Indeks SPBE adalah Asistensi Kegiatan Persiapan Penilaian SPBE, melakukan Review Peta Rencana SPBE sebagai upaya

akselerasi capaian Indeks SPBE

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Meningkatnya layanan SPBE melalui kebijakan dan tata kelola TIK	Persentase layanan publik online dan terintegrasi	94%	94 %	100%
Meningkatnya sistem keterbukaan informasi publik	Nilai Hasil Monev PPID	86	88.69	103,13%
Meningkatnya pemanfaatan data statistik daerah	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan dan evaluasi pembangunan	97%	100 %	103,09 %
Meningkatnya Keamanan Informasi	Indeks KAMI	46.51	46.8	100,62%
Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85	85.27	100,32%

1. Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Target Dan Realisasi 2023

Pengukuran kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar beserta target dan capaian realisasinya dirinci seperti hasil analisis sebagai berikut :

Sasaran : Meningkatnya layanan SPBE melalui kebijakan dan tata kelola TIK

1. Indikator sasaran 1 :

Tabel 3. 3 Pengukuran Realisasi Kinerja Indikator Sasaran 1 Tahun 2023

Indikator Kinerja	Rumus Perhitungan	Target 2023	Realisasi 2023	%
Persentase layanan publik online dan terintegritasi	$\frac{\text{Jumlah Layanan publik online dan terintegritasi}}{\text{Jumlah layanan publik}} \times 100 \%$	94%	94 %	100%

Analisis :

Indikator sasaran 1 pada tahun 2023 telah terealisasi 94 % dari target sebesar 94 % Pada indikator ini dapat dikatakan sangat berhasil/tercapai karena telah mencapai target yang telah ditetapkan.

Pada indikator ini dapat dikatakan sangat / tercapai karena telah melebihi dari target yang telah ditetapkan. Pada tabel di atas juga

menggambarkan kinerja yang dilakukan melalui program-program yang direncanakan dan dilaksanakan secara optimal. Pada tahun 2023 terdapat pengintegrasian dari 2 layanan :

- a. Pariwisata yaitu aplikasi Visit Blitar
- b. Kebudayaan yaitu aplikasi Ibundani

Dari jumlah target pengintegrasian layanan publik 100 % pada akhir Renstra 2021-2026 (32 layanan) Sehingga pada tahun 2023 capaian kinerja layanan publik online dan terintegrasi sejumlah 30 layanan atau 94% (naik 4% dari tahun 2022). Sisanya akan menjadi target di tahun 2024 sebanyak 32 layanan publik.

Untuk memudahkan pengintegrasian, upaya yang dilakukan adalah mematuhi arsitektur peta rencana yang telah ditetapkan sehingga sesuai dengan *timeline*. Dalam proses pencapaian target masih ditemui permasalahan dan faktor penghambat yakni Perlu adanya pedoman teknis cara kerja layanan publik dan inovasi untuk dapat diterapkan secara terintegrasi. Perlu adanya standar manajemen layanan sistem elektronik. Proses pengembangan dan implementasi perubahan aplikasi layanan dan Perlunya melalui tahap perencanaan yang baik

Permasalahan dan hambatan tersebut dapat di tindaklanjuti melalui Mensosialisasikan arsitektur proses bisnis dan layanan sistem elektronik sesuai indikator yang ada di SPBE. Menyusun standar manajemen layanan mulai dari pelayanan pengguna hingga pengoperasian layanan tersebut. Sosialisasi standar teknis pengembangan aplikasi

Tabel 3. 4 Data Jumlah Sistem Informasi sampai dengan Tahun 2023

NO	LAYANAN PUBLIK	TERSEDIA
		2023
1	Kependudukan	1
2	Perpajakan dan Retribusi	1
3	Perijinan	1

4	Pengaduan Masyarakat	1
5	Kesehatan	1
6	Pendidikan	1
7	Pengaduan	1
8	Industri	1
9	Perpustakaan	1
10	Koperasi	1
11	Lingkungan Hidup	1
12	Investasi dan Bisnis	1
13	Tata Ruang	1
14	Perdagangan	1
15	UMKM	1
16	Transportasi	1
17	Peternakan	1
18	Jalan dan Jembatan	1
19	Perumahan	1
20	Sosial	1
21	Pemuda dan Olahraga	1
22	Ketenagakerjaan	1
23	IKM	1
24	Sarana / Pekerjaan Umum	1

25	Potensi Daerah	1
26	Perikanan dan Kelautan	1
27	Pertanian dan Perkebunan	1
28	Pergudangan	1
29	Pengairan	-
30	Pengelolaan Pasar	-
31	Pariwisata	1
32	Kebudayaan	1
	JUMLAH	32

Sasaran : Meningkatnya Sistem Keterbukaan Informasi Publik

2. Indikator Sasaran 2 :

Tabel 3. 5 Pengukuran Realisasi Kinerja Indikator Sasaran 2 Tahun 2023

Indikator Kinerja	Rumus Perhitungan	Target 2023	Realisasi 2023	%
Nilai Hasil Monev PPID	Pemeringkatan Monev Keterbukaan Informasi Publik (Berdasarkan Perki No 1 Tahun 2022)	86	88.69	103,13 %

Analisis :

Berdasarkan tabel Indikator sasaran 2 Nilai Hasil Monev PPID di Diskominfo tidak mencapai target yang sudah ditetapkan. Data diatas memberikan informasi bahwa target Nilai Hasil Monev PPID di Diskominfo untuk tahun 2023 sebesar 86. Bahwa pada tahun 2023 dapat terealisasi bahkan melebihi target dengan realisasi Nilai Hasil Monev PPID sebesar 88,69 dan capaian kinerja sebesar 103%. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa kinerja keterbukaan informasi publik dapat berjalan sesuai target yang direncanakan. Pada tabel di atas juga menggambarkan kinerja yang dilakukan melalui program-program yang direncanakan dan dilaksanakan secara optimal.

Beberapa kegiatan yang dilaksanakan Tahun 2023 untuk mendukung capaian kinerja Keterbukaan Informasi Publik adalah Rapat Koordinasi PPID pelaksana se Kota Blitar, Bimbingan Teknis Pengelolaan Informasi Publik, Sosialisasi dan Launching Aplikasi DIOPEN, dan Bimtek Monev Keterbukaan Informasi Publik

Dalam proses pencapaian target masih ditemui permasalahan dan faktor penghambat yakni Perlunya kelengkapan data dukung proses pengadaan barang dan jasa oleh perangkat daerah. Kurangnya pemahaman atas pemenuhan data dukung pada SAQ. Kurangnya perhatian anggaran yang mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada perangkat daerah Beberapa data dukung di perangkat daerah belum tercukupi, Kurangnya Pendampingan di Perangkat Daerah dalam pemenuhan bukti dukung SAQ. Permasalahan dan hambatan tersebut dapat di tindaklanjuti melalui Optimalisasi dukungan perangkat daerah dalam memberikan data pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Mengadakan rapat koordinasi dan monev atas hasil monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik oleh Komisi Informasi. Himbauan kepada perangkat daerah untuk mengalokasikan anggaran keterbukaan informasi publik. Dengan faktor pendukung sebagai berikut Sebagian data dukung dari perangkat Daerah untuk pemenuhan SAQ tercukupi. Sinergi dan kolaborasi antar Perangkat Daerah dalam pemenuhan data dukung SAQ serta adanya dukungan dari Pimpinan

Sasaran : Meningkatnya Pemanfaatan Data Statistik Daerah

3. Indikator sasaran 3 :

Tabel 3. 6 Pengukuran Realisasi Kinerja Indikator Sasaran 3 Tahun 2023

Indikator Kinerja	Rumus Perhitungan	Target 2023	Realisasi 2023	%
Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan dan evaluasi pembangunan	Jumlah OPD yang menggunakan data statistik utk perencanaan dan evaluasi pembangunan/ jumlah OPD X 100%	97%	100%	103,09 %

Analisis :

Indikator sasaran 3 pada tahun 2023 telah terealisasi 100% dari target sebesar 97%. Pada indikator ini dapat dikatakan berhasil/tercapai karena telah melampaui target yang telah ditetapkan.

Beberapa kegiatan yang dilaksanakan Tahun 2023 untuk mendukung capaian kinerja Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan dan evaluasi pembangunan adalah Bimbingan teknis Penyusunan Data Statistik Sektoral kepada seluruh Perangkat Daerah serta Pendampingan Penyusunan Data Statistik Sektoral dan Pendampingan Pengajuan Rekomendasi Statistik melalui aplikasi Romantik

Pada aplikasi data telah ditetapkan jenis data yaitu Renja 2023 dan LKJIP 2022 yang akan dipublikasikan dari 30 perangkat daerah yang ada di lingkup Pemerintah Kota Blitar. Pada tahun 2023 ini telah terkumpul data dari 30 perangkat daerah, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3. 7 DAFTAR PERANGKAT DAERAH YANG MENGGUNAKAN DATA STATISTIK DALAM MENYUSUN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DI KOTA BLITAR PADA TAHUN 2023

No .	OPD	Perencanaan	
		Data Sektoral	Analisis
1	Sekretariat Daerah	✓	✓
2	Bappeda	✓	✓
3	BPKAD	✓	✓
4	BPKSDM	✓	✓
5	Sekretariat DPRD	✓	✓
6	Inspektorat Daerah	✓	✓
7	Dinas Pendidikan	✓	✓
8	Dinas Kesehatan	✓	✓
9	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	✓	✓
10	Dispera dan KP	✓	✓
11	Dinas Sosial	✓	✓
12	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	✓	✓
13	Dinas P3A, P2 dan KB	✓	✓
14	Dinas Lingkungan Hidup	✓	✓
15	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	✓	✓
16	Dinas Perhubungan	✓	✓
17	Diskominfotik	✓	✓
18	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja	✓	✓
19	Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga	✓	✓
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	✓	✓
21	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	✓	✓
22	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	✓	✓

23	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	✓	✓
24	Satpol PP	✓	✓
25	Bakesbangpol	✓	✓
26	BPBD	✓	✓
27	Rumah Sakit Mardi Waluyo	✓	✓
28	Kecamatan Sananwetan	✓	✓
29	Kecamatan Kepanjenkidul	✓	✓
30	Kecamatan Sukorejo	✓	✓
		100,00%	100,00%

Tabel 3. 8 DAFTAR PERANGKAT DAERAH YANG MENGGUNAKAN DATA STATISTIK DALAM MENYUSUN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH DI KOTA BLITAR PADA TAHUN 2023

No	OPD	Perencanaan	
		Data Sektoral	Analisis
1	Sekretariat Daerah	✓	✓
2	Bappeda	✓	✓
3	BPKAD	✓	✓
4	BPKSDM	✓	✓
5	Sekretariat DPRD	✓	✓
6	Inspektorat Daerah	✓	✓
7	Dinas Pendidikan	✓	✓
8	Dinas Kesehatan	✓	✓
9	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	✓	✓
10	Dispera dan KP	✓	✓
11	Dinas Sosial	✓	✓

12	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	✓	✓
13	Dinas P3A, P2 dan KB	✓	✓
14	Dinas Lingkungan Hidup	✓	✓
15	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	✓	✓
16	Dinas Perhubungan	✓	✓
17	Diskominfotik	✓	✓
18	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja	✓	✓
19	Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga	✓	✓
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	✓	✓
21	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	✓	✓
22	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	✓	✓
23	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	✓	✓
24	Satpol PP	✓	✓
25	Bakesbangpol	✓	✓
26	BPBD	✓	✓
27	Rumah Sakit Mardi Waluyo	✓	✓
28	Kecamatan Sananwetan	✓	✓
29	Kecamatan Kepanjenkidul	✓	✓
30	Kecamatan Sukorejo	✓	✓
		100,00%	100,00 %

Pada tabel di atas juga menggambarkan kinerja yang dilakukan melalui program-program yang direncanakan dan dilaksanakan secara optimal. Dalam proses pencapaian target masih ditemui permasalahan dan faktor penghambat yakni Perlunya optimalisasi penggunaan data statistik sektoral dalam analisa perencanaan pembangunan dan evaluasi pembangunan PD. Perlunya optimalisasi kuantitas penggunaan data statistik sektoral dalam perencanaan pembangunan dan evaluasi

pembangunan PD. Perlunya optimalnya pemanfaatan data statistik sektoral dalam pengambilan keputusan di PD. Belum optimalnya pemahaman operator Data OPD tentang pengelolaan data statistik daerah. Permasalahan dan hambatan tersebut dapat di tindaklanjuti melalui Pendampingan Pengolahan Data Statistik Sektoral pada Perencanaan pembangunan dan Evaluasi pembangunan pada perangkat daerah. Memberikan rekomendasi dan analisis pada perangkat daerah yang menangani perencanaan dan evaluasi. Dengan faktor pendukung sebagai berikut Kerjasama dan koordinasi yang baik dengan Pembina Data (BPS), Koordinator data (Bappeda) serta OPD selaku produsen data dalam penyusunan data statistik sektoral

Sasaran : Meningkatnya Keamanan Informasi

4. Indikator sasaran 4 :

Tabel 3. 9 Pengukuran Realisasi Kinerja Indikator Sasaran 4 Tahun 2023

Indikator Kinerja	Rumus Perhitungan	Target 2023	Realisasi 2023	%
Indeks KAMI	Jumlah nilai per area keamanan informasi/ Jumlah area penilaian x 100%	46.51	46.8	100.62 %

Analisis :

Indikator sasaran 4 pada tahun 2023 telah terealisasi 100.6% dari target sebesar 46.51 realisasi 46.8. Pada indikator ini dapat dikatakan

sangat / tercapai karena telah melebihi dari target yang telah ditetapkan.

Pada tabel di atas juga menggambarkan kinerja yang dilakukan melalui program-program yang direncanakan dan dilaksanakan secara optimal. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan Tahun 2023 untuk mendukung capaian kinerja Indeks KAMI adalah Bimbingan Teknis Penyusunan Indeks KAMI serta Bimbingan Teknis CSIRT yang menghasilkan Penyusunan Tim BlitarKota-CSIRT

Dalam proses pencapaian target masih ditemui permasalahan dan faktor penghambat yakni Perlunya peningkatan tata kelola keamanan informasi pada perangkat daerah. Perlunya peningkatan penerapan pengelolaan risiko SPBE serta Belum optimalnya SDM yang memahami IT dan keamanan informasi pada masing-masing OPD. Permasalahan dan hambatan tersebut dapat di tindaklanjuti melalui

Pendampingan dan Asistensi Indeks KAMI dan Manajemen Risiko SPBE perangkat daerah yang menjadi objek penilaian yang memperoleh nilai rendah. Memberikan rekomendasi pada perangkat daerah yang menjadi sasaran penilaian Indeks KAMI. Dengan faktor pendukung sebagai berikut Tersedianya kebijakan dan aturan yang memadai tingkat Kota Blitar berkaitan dengan keamanan informasi

Sasaran : Nilai SAKIP Perangkat Daerah

5. Indikator sasaran 5 :

Indikator Kinerja	Rumus Perhitungan	Target 2023	Realisasi 2023	%
Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Kategori Sakip PD Berdasarkan evaluasi/penilaian dari Inspektorat Daerah Kota Blitar	85	85.27	100,32 %

Analisis :

Indikator sasaran 5 pada tahun 2023 telah terealisasi 85.27 dari target sebesar 85 realisasi 100.3%. Pada indikator ini dapat dikatakan tercapai karena telah melebihi dari target yang telah ditetapkan dengan kategori berhasil.

Keberhasilan ini ditentukan oleh dukungan dari masing bidang untuk dokumen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja serta evaluasi internal yang memenuhi standar sesuai dengan pertauran yang telah ditetapkan.

Sedangkan untuk faktor penghambat yaitu pengumpulan data kinerja masih dilakukan secara manual belum memanfaatkan teknologi informasi serta kurangnya pemahaman dan kepedulian pegawai akan pentingnya pengukuran kinerja serta pemanfaatannya untuk perencanaan kedepannya. Belum optimalnya pemanfaatan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal untuk perbaikan ataupun peningkatan akuntabilitas, peningkatan efektifitas, efisiensi kinerja dan peningkatan kinerja.

Tindak lanjut perbaikan 2023 :

1. Memanfaatkan teknologi informasi dalam pengumpulan data kinerja
2. Memanfaatkan hasil monitoring dan evaluasi pengukuran kinerja untuk penyesuaian (refocusing) organisasi, penyesuaian kebijakan, strategi, dan penyesuaian kebijakan dalam mencapai kinerja
3. Memanfaatkan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja, mendukung efektivitas dan efisiensi kinerja, perbaikan dan peningkatan

Keberhasilan / kegagalan pencapaian target pada Perjanjian Kinerja tahun 2023 ditunjukkan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3. 10 Tabel Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Target dan Realisasi Tahun 2023

Tujuan	Indikator Kinerja	Capaian 2023	Sangat Berhasil	Berhasil	Cukup Berhasil	Tidak Berhasil
Meningkatnya pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik	130%	✓			

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian 2023	Sangat Berhasil	Berhasil	Cukup Berhasil	Tidak Berhasil
Meningkatnya layanan SPBE melalui kebijakan dan tata kelola TIK	Persentase layanan publik online dan terintegritasi	100%	✓			
Meningkatnya sistem keterbukaan informasi publik	Nilai Hasil Monev PPID	103 %	✓			
Meningkatnya pemanfaatan data statistik daerah	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan	103 %	✓			

	pembangunan dan evaluasi pembangunan					
Meningkatnya Keamanan Informasi	Indeks KAMI	100.6 %	✓			
Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	100.3 %	✓			
Rata – rata Keberhasilan Pencapaian Sasaran Strategis		101.39 %	SANGAT BERHASIL			

Berdasarkan akumulasi capaian indikator kinerja dari masing-masing indikator kinerja utama yang telah dijabarkan sampai pada program dan kegiatan, dapat diperoleh gambaran bahwa untuk pelaksanaan kegiatan yang dilakukan pada 2023 masuk ke dalam kategori pertama atau “sangat berhasil” dengan nilai rata rata capaian 101.38 % (seratus satu koma tiga puluh delapan).

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022-2023

Realisasi Kinerja yang telah dihitung pada tahun 2023 ini, selanjutnya agar diketahui sejauh mana peningkatan kinerja disetiap indikator dalam memenuhi targetnya maka perlu dibandingkan realisasi antara kinerja tahun 2023 dengan kinerja tahun sebelumnya.

Untuk mengetahui perbandingan realisasi kinerja tersebut dapat dilihat pada Tabel perbandingan dibawah ini :

Tabel 3. 11 Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022-2023

TUJUAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2022	REALISASI 2022	% CAPAIAN	TARGET 2023	REALISASI 2023	% CAPAIAN
Meningkatn	Indeks	2.3	2.81	122%	2.82	3.68	130,50%

ya pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	sistem pemerintahan berbasis elektronik	1					
---	---	---	--	--	--	--	--

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2022	REALISASI 2022	% CAPAIAN	TARGET 2023	REALISASI 2023	% CAPAIAN
Meningkatnya layanan SPBE melalui kebijakan dan tata kelola TIK	Persentase layanan publik online dan terintegrasi	89%	90 %	101,1 %	94%	94%	100%
Meningkatnya sistem keterbukaan informasi publik	Nilai Hasil Monev PPID	81%	76 %	93,8 %	86	88,69	103,13%
Meningkatnya pemanfaatan data statistik daerah	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan dan evaluasi pembangunan	96%	100%	104,16 %	97%	100%	103,09%
Meningkatnya	Indeks	38,	39,4	101,65	46,51	46,8	100,62%

Keamanan Informasi	KAMI	76		%			
Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84,28	84,82	101%	85	85,27	100,32%

Melihat Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2022– 2023 sebagaimana tersebut diatas maka dapat dijelaskan sebagai berikut :

Berdasarkan tabel diatas realisasi tahun 2022 terdapat satu sasaran yang belum mencapai target yaitu Meningkatnya sistem keterbukaan informasi publik dengan capaian 93,8% sedangkan pada realisasi 2023 seluruh sasaran mencapai target dengan predikat sangat berhasil.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Akhir Periode Renstra

Bila melihat capaian data tahun 2023 seperti diatas, dan dibandingkan dengan rencana target pencapaian di akhir Renstra pada tahun 2023 maka dapat dilihat perbandingannya seperti tabel berikut :

Tabel 3. 12 Perbandingan Kinerja sampai dengan Akhir Periode Renstra

Tujuan	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi	Tingkat Kemajuan
Meningkatnya pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik	4,35	3,68	84.59%

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi	Tingkat Kemajuan
Meningkatnya layanan SPBE melalui kebijakan dan tata kelola TIK	Persentase layanan publik online dan terintegritasi	100%	94 %	94%
Meningkatnya sistem keterbukaan informasi publik	Nilai Hasil Monev PPID	100	88,69	88,69%
Meningkatnya pemanfaatan data statistik daerah	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan dan evaluasi pembangunan	100%	100 %	100%

Meningkatnya Keamanan Informasi	Indeks KAMI	69,77%	46,8%	67,07%
Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	88,75	85,27	96,07%

Berdasarkan tabel diatas dapat dianalisis bahwa sampa dengan akhir 2023 beberapa target indikator belum tercapai keseluruhannya, hal ini disebabkan karena :

Bahwa realisasi indikator persentase layanan publik online dan terintegritasi mencapai 94% sementara bila dibandingkan dengan target akhir renstra 100% maka terdapat target yang harus dipenuhi sebesar 6% untuk mencapai target diperlukan Langkah-langkah kebijakan demi mencukupi kekurangan tersebut sehingga dengan demikian target dilaksanakan sesuai dengan yang telah di tetapkan waktu pada yang tersisa.

Untuk realisasi indikator nilai hasil monev PPID mencapai 88,69% sementara bila dibandingkan dengan target akhir renstra 100 maka terdapat target yang harus dipenuhi sebesar 11,31% untuk mencapai target diperlukan Langkah-langkah kebijakan demi mencukupi kekurangan tersebut sehingga dengan demikian target dilaksanakan sesuai dengan yang telah di tetapkan waktu pada yang tersisa.

Karena sudah mencapai target akhir renstra 100% indikator Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan dan evaluasi pembangunan, maka pada tahun 2023 yang di targetkan sebesar 100% maka target kondisi akhir di 2023 akan dijadikan target tahun berikutnya yaitu tahun 2024

Untuk realisasi indikator Indeks KAMI mencapai 67,07% sementara bila dibandingkan dengan target akhir renstra 69,77% maka terdapat target yang harus dipenuhi sebesar 2,7% untuk mencapai target

diperlukan Langkah-langkah kebijakan demi mencukupi kekurangan tersebut sehingga dengan demikian target dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan waktu pada yang tersisa.

Selanjutnya realisasi indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah mencapai 96,08% sementara bila dibandingkan dengan target akhir renstra 88,75 maka terdapat target yang harus dipenuhi sebesar 3,92% untuk mencapai target diperlukan Langkah-langkah kebijakan demi mencukupi kekurangan tersebut sehingga dengan demikian target dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan waktu pada yang tersisa.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Realisasi Nasional (Target SPM)

Salah satu fungsi Organisasi Perangkat Daerah dalam ikut serta proses pencapaian tujuan Nasional dibidang Komunikasi dan Informatika adalah dengan membandingkan realisasi kinerja daerah sesuai dengan SPM Nasional, sampai dengan tahun 2023 perbandingan realisasinya adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 13 Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Realisasi Nasional (Target SPM)

Tujuan	Indikator Kinerja	Realisasi	Realisasi Nasional Tahun 2023	Realisasi Daerah Sekitar				Keterangan
				Provinsi Jawa Timur	Kota Malang	Kota Madiun	Kota Kediri	

Meningkatnya pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik	3,68	2,79	3,62	3,82	4,45	3,65	Kepmen Nomor 013 Tahun 2024 Tentang Hasil Evaluasi SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2023
---	--	------	------	------	------	------	------	--

Dari data laporan kinerja yang diperoleh terdapat 5 (lima) kinerja yang dapat disandingkan dengan kinerja nasional hasil dari evaluasi yang dilakukan diperoleh Indeks SPBE Nasional Tahun 2023 adalah 2,79 dengan predikat baik. Sedangkan capaian Kota Blitar masih lebih tinggi dari capaian Nasional yaitu 3.68

Capaian Kinerja SPBE Provinsi Jawa Timur diperoleh nilai 3.62. Capaian kinerja Kota Malang lebih tinggi dari capaian Provinsi Jawa Timur yaitu 3.82. Capaian Kinerja Kota Madiun perolehannya jauh lebih tinggi dari provinsi Jawa Timur yaitu 4.45. Capaian Kinerja Kota Kediri perolehannya jauh lebih tinggi dari provinsi Jawa Timur yaitu 3.65

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN (Cost Per Outcome)

Dalam melakukan tugas, pokok dan fungsinya, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar didukung melalui anggaran APBD 2023 sebagai berikut :

1.	Belanja Langsung	:	Rp. 14.412.055.999
-----------	-------------------------	----------	---------------------------

Dari APBD 2023 tersebut, hingga bulan Desember tahun 2023 telah terealisasi anggaran sebesar Rp. 14.202.178.002 atau sebesar 98,54%. Adapun realisasi belanja langsung tahun 2023 pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar dapat disampaikan sebagai berikut :

Tabel 3. 14 TABEL ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA LANGSUNG

NO	Uraian	Jumlah (Rp)		%
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	
1	BELANJA DAERAH	14.412.055.999,00	14.202.178.002,00	98,54
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	13.896.898.625,00	13.690.710.786,00	98,52
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.105.687.323,00	4.969.185.948,00	97,33

4	Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	32.600.001,00	32.025.031,00	98, 24
5	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.500.001,00	2.490.000,00	99, 60
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	25.000.000,00	24.500.031,00	98, 00
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.100.000,00	5.035.000,00	98, 73
8	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.741.121.847, 00	3.621.820.418,0 0	96, 81
9	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.733.586.000, 00	3.614.339.018,0 0	96, 81
10	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD	7.535.847,00	7.481.400,00	99, 28
11	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	94.675.622,00	94.241.500,00	99, 54
12	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	27.120.000,00	26.944.000,00	99, 35
13	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	67.555.622,00	67.297.500,00	99, 62
14	Administrasi Umum Perangkat Daerah	407.460.099,0 0	404.690.122,00	99, 32
15	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.016.155,00	9.955.000,00	99, 39

16	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	148.240.849,0 0	147.487.800,00	99, 49
17	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	26.071.256,00	25.148.000,00	96, 46
18	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	45.710.412,00	45.678.000,00	99, 93
19	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6.005.927,00	5.930.000,00	98, 74
20	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.380.000,00	3.480.000,00	79, 45
21	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	167.035.500,0 0	167.011.322,00	99, 99
22	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	567.835.603,0 0	557.109.746,00	98, 11
23	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	335.785.603,0 0	334.099.287,00	99, 50
24	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	232.050.000,0 0	223.010.459,00	96, 10
25	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	261.994.151,0 0	259.299.131,00	98, 97
26	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	101.388.125,0 0	99.888.431,00	98, 52

27	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	92.606.026,00	92.163.000,00	99,52
28	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	68.000.000,00	67.247.700,00	98,89
29	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.418.788.250,00	2.394.622.618,00	99,00
30	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.418.788.250,00	2.394.622.618,00	99,00
31	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	4.786.641,00	4.717.475,00	98,56
32	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	17.220.910,00	16.920.700,00	98,26
33	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	9.229.493,00	8.884.700,00	96,26
34	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	187.041.128,00	186.588.440,00	99,76
35	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	644.218.566,00	626.779.362,00	97,29
36	Pelayanan Informasi Publik	517.514.723,00	516.391.141,00	99,78
37	Layanan Hubungan Media	778.971.700,00	777.677.100,00	99,83
38	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	184.829.260,00	182.366.900,00	98,67

39	Manajemen Komunikasi Krisis	5.653.486,00	5.325.500,00	94,20
40	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	14.100.522,00	13.962.500,00	99,02
41	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat. Media dan Kemitraan Komunitas	55.221.821,00	55.008.800,00	99,61
42	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	6.372.423.052,00	6.326.902.220,00	99,29
43	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	5.349.132.088,00	5.334.544.570,00	99,73
44	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	5.950.000,00	5.950.000,00	100,00
45	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	38.250.000,00	38.250.000,00	100,00
46	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	5.304.932.088,00	5.290.344.570,00	99,73

47	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.023.290.964,00	992.357.650,00	96,98
48	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.550.593,00	6.547.500,00	99,95
49	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	50.795.000,00	50.045.000,00	98,52
50	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	7.767.062,00	6.690.000,00	86,13
51	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	259.874.510,00	253.350.000,00	97,49
52	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	88.059.062,00	87.159.600,00	98,98
53	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	9.827.062,00	9.150.000,00	93,11
54	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	318.645.082,00	315.364.000,00	98,97
55	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	1.590.000,00	1.590.000,00	100,00

56	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	33.139.172,00	32.221.642,00	97,23
57	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	245.326.359,00	228.649.908,00	93,20
58	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	1.717.062,00	1.590.000,00	92,60
59	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	331.596.642,00	328.282.240,00	99,00
60	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	331.596.642,00	328.282.240,00	99,00
61	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	331.596.642,00	328.282.240,00	99,00
62	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan. Pengolahan. Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	259.513.961,00	256.800.737,00	98,95
63	Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	10.127.513,00	9.950.500,00	98,25
64	Membangun Metadata Statistik Sektoral	25.000.000,00	24.750.003,00	99,00

65	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	29.369.584,00	29.200.000,00	99,42
66	Pengembangan Infrastruktur	3.180.000,00	3.180.000,00	100,00
67	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	4.405.584,00	4.401.000,00	99,90
68	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	183.560.732,00	183.184.976,00	99,80
69	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	183.560.732,00	183.184.976,00	99,80
70	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	105.843.599,00	105.496.350,00	99,67
71	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	21.675.799,00	21.646.150,00	99,86
72	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	20.794.338,00	20.784.000,00	99,95

73	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	19.723.286,00	19.687.000,00	99,82
74	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	43.650.176,00	43.379.200,00	99,38
75	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	77.717.133,00	77.688.626,00	99,96
76	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	77.717.133,00	77.688.626,00	99,96

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa anggaran yang terealisasi sebesar Rp **14.202.178.002** atau sebesar 98,54 %. dari total anggaran Belanja Langsung sebesar **14.412.055.999**

1. Menghitung Alokasi Per Tujuan Dan / Atau Sasaran Pembangunan

Untuk mengetahui persentase anggaran pada sasaran strategis dibandingkan dengan keseluruhan anggaran Belanja Langsung pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar dapat diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 3. 15 ALOKASI PER TUJUAN DAN / ATAU SASARAN PEMBANGUNAN

Tujuan/Sasaran/Kinerja Utama	Indikator Sasaran	Anggaran (Rp)	(%)
Meningkatnya pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik	14.412.055.999	100

Tujuan/Sasaran/Kinerja Utama	Indikator Sasaran	Anggaran (Rp)	(%)
Meningkatnya layanan SPBE melalui kebijakan dan tata kelola TIK	Persentase layanan publik online dan terintegritasi	6.372.423.052	45,51
Meningkatnya sistem keterbukaan informasi publik	Nilai Hasil Monev PPID	2.418.788.250	16,58
Meningkatnya pemanfaatan data statistik daerah	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan	331.596.642	2,60

	pembangunan dan evaluasi pembangunan		
Meningkatnya Keamanan Informasi	Indeks KAMI	183.560.732	2,37
Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	5.105.687.323	32,94

Dari tabel tersebut bahwa anggaran terbesar dari Dinas Kominfo dan Statistik pada tahun 2023 adalah untuk mendukung sasaran Persentase layanan publik online dan terintegritasi pada OPD dialokasikan Rp. 6.372.423.052 atau 45,51% dari pagu anggaran Diskominfo, Nilai Hasil Monev PPID dialokasikan Rp2.418.788.250 atau 16,58% dari pagu anggaran Diskominfo. Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan dan evaluasi pembangunan dialokasikan Rp. 331.596.642 atau 2,60% dari pagu anggaran Diskominfo. Indeks KAMI Rp. 183.560.732 atau 2,37% dari pagu anggaran Diskominfo. Nilai SAKIP Perangkat Daerah dialokasikan Rp. 5.105.687.323 atau mencapai 32.94% dari pagu anggaran Diskominfo. Hal ini diperuntukkan untuk Meningkatkan pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

2. Menghitung Pencapaian Kinerja Dan Anggaran

Untuk pencapaian kinerja dan anggaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar, dijabarkan ke dalam tabel berikut :

Tabel 3. 16 PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2023

Tujuan/Sasaran/ Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	% Capaian	Alokasi	Realisasi	% Capaian
Meningkatnya pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik	2,82	3,68	130,50%	14.412.055.999,00	14.202.178.002,00	98,54
Meningkatnya layanan SPBE melalui kebijakan dan tata kelola TIK	Persentase layanan publik online dan terintegrasi	94%	94%	100%	6.372.423.052,00	6.326.902.220,00	99,29

Meningkatnya sistem keterbukaan informasi publik	Nilai Hasil Monev PPID	86	88,69	103,13%	2.418.788.250,00	2.394.622.618,00	99,00
Meningkatnya pemanfaatan data statistik daerah	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan dan evaluasi pembangunan	97%	100%	103,09%	331.596.642,00	328.282.240,00	99,00
Meningkatnya Keamanan Informasi	Indeks KAMI	46,51	46,8	101,62%	183.560.732,00	183.184.976,00	99,80

Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85	85,27	100,32%	5.105.687.323,00	4.969.185.948,00	97,33
---------------------------------------	------------------------------	----	-------	---------	------------------	------------------	-------

Dari data diatas terlihat bahwa Rata rata capaian kinerja dan anggaran adalah 101,39% kinerja yang dicapai pada tahun 2023, dengan menggunakan anggaran sebesar 98,54 %, ada beberapa Anggaran yang pada tahun 2023 tidak terserap sebesar Rp 209.877.997,00,-, realisasi anggaran yang terendah adalah pada sasaran Nilai SAKIP Perangkat Daerah hanya mencapai Rp. 4.969.185.948,00 dari pagu sebesar Rp. 5.105.687.323,00 atau mencapai 97,33%

3. Menghitung Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan anggaran atas kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar ditunjukkan dalam tabel berikut :

Tabel 3. 17 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2023

N o	Tujuan/Sasaran/Kinerja Utama	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik	130,50 %	98,54%	1,32%
2	Meningkatnya layanan SPBE melalui kebijakan dan tata kelola TIK	Persentase layanan publik online dan terintegritasi	100%	99,29%	1,01%

3	Meningkatnya sistem keterbukaan informasi publik	Nilai Hasil Monev PPID	103,13 %	99	1,04%
4	Meningkatnya pemanfaatan data statistik daerah	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan dan evaluasi pembangunan	103,09 %	99%	1,04%
5	Meningkatnya Keamanan Informasi	Indeks KAMI	100,62 %	99,80%	1,01%

6	Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	100,32 %	97,33%	1,03
---	---------------------------------------	------------------------------	----------	--------	------

Tujuan Dinas dengan indikator Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik, capaian kinerja 130%, dengan capaian anggaran sebesar 98,54% maka Tingkat efisiensi mencapai 1,32%. Sasaran strategis yang pertama dengan indikator persentase layanan publik online dan terintegrasi, capaian kinerja 100%, dengan capaian anggaran sebesar 99,29%, maka tingkat efisiensi mencapai 1,01%. Hal ini menunjukkan kinerja sasaran strategis pertama efisien, karena capaian kinerja dari persentase layanan publik lebih tinggi dibandingkan penyerapan anggaran pengelolaan aplikasi informatika. Selain itu pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan berkolerasi positif terhadap capaian kinerja meliputi penyampaian informasi dan kebijakan pemerintah daerah melalui Pelatihan TIK ASN dan Masyarakat, pembangunan Web sekolah dan Bimteknya, Bimtek Smart City, Fasilitasi jaringan intra pemerintah, fasilitasi Internet RT, Review Master Plan SPBE, Evaluasi Mandiri SPBE Tahun 2023, Audit aplikasi, Pendaftaran Sistem Elektronik (Aplikasi Pemda), Pemeliharaan jaringan.

Untuk sasaran strategis yang kedua dengan indikator Nilai Hasil Monev PPID, capaian kinerja 103%, dengan capaian anggaran sebesar 99%, maka tingkat efisiensi mencapai 1,04%. Hal ini menunjukkan kinerja sasaran strategis kedua efisien, karena capaian kinerja dari persentase layanan publik lebih tinggi dibandingkan penyerapan anggaran pengelolaan informasi dan komunikasi publik. Tercapainya kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan dengan efisiensi anggaran dikarenakan kegiatan dilaksanakan sesuai dengan rencana dan jadwal

yang telah ditetapkan. Selain itu pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan berkolerasi positif terhadap capaian kinerja meliputi penyampaian informasi dan kebijakan pemerintah daerah melalui kelompok masyarakat, komunitas, kesenian tradisional dan mitra pemangku kepentingan diantaranya Penyelenggaraan seni tradisional Pertura, Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat, Bimbingan Teknis Admin Medsos seluruh perangkat daerah, Peningkatan Kapasitas SDM .. , Pembinaan Insan Media, Temu Pegiat Media Sosial, Rapat Koordinasi Bakohumas se-Kota Blitar, Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat Pendengar Radio Mahardhika. Blitar Competition 5.0 (Debat Mahasiswa, Cerdas Cermat SMP-SMA), Monev Pengaduan (ULPIM, SP4N Lapor dan Call Centre 112)

Untuk sasaran strategis yang ketiga dengan indikator persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan dan evaluasi pembangunan, capaian kinerja 103%, dengan capaian anggaran sebesar 99%, maka tingkat efisiensi mencapai 1,04%. Hal ini menunjukkan kinerja sasaran strategis ketiga efisien, karena capaian kinerja dari persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan dan evaluasi pembangunan lebih tinggi dibandingkan penyerapan anggaran penyelenggaraan statistik sektoral. Tercapainya kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan dengan efisiensi anggaran dikarenakan kegiatan dilaksanakan sesuai dengan rencana dan jadwal yang telah ditetapkan. Selain itu pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan berkolerasi positif terhadap capaian kinerja meliputi Penyusunan Profil BPBD dan Diskominfo, Video Profil Kota Blitar, Penyusunan Buku Data Statistik Sektoral, Penyusunan Buku Analisis Ekonomi Makro, Penyusunan Buku Metadata Analisa Konsumsi Pangan DKPP, Seminar Percepatan Implementasi Satu Data Kota Blitar.

Untuk sasaran strategis yang keempat dengan indikator Indeks KAMI, capaian kinerja 101%, dengan capaian anggaran sebesar 99,80%, maka tingkat efisiensi mencapai 1,01%. Hal ini menunjukkan kinerja sasaran strategis keempat efisien, karena capaian kinerja dari Indeks

KAMI lebih tinggi dibandingkan penyerapan anggaran penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi. Tercapainya kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan dengan efisiensi anggaran dikarenakan kegiatan dilaksanakan sesuai dengan rencana dan jadwal yang telah ditetapkan. Selain itu pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan berkolerasi positif terhadap capaian kinerja meliputi Launcing Aplikasi Sekarturi (Sertifikat Elektronik Untuk Aparatur Sehari-Hari) dan Launcing BlitarKota-CSIRT, Jaring Komunikasi Persandian Pemerintah Kota Blitar

Salah satu unsur yang mendukung capaian efisiensi dalam semua pelaksanaan program dan kegiatan diatas dimulai dengan proses pengadaan barang dan jasa dimana dalam proses tersebut ada negosiasi harga atau nilai kontrak yang pada akhirnya mengakibatkan efisiensi tanpa menguarangi kualitas dan hasil dari pelaksana kegiatan tersebut. Dalam pengadaan barang dan jasa melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Pejabat barang dan jasa dalam menentukan HPS melakukan negosiasi disetiap pengadaan barang dan jasa
2. Kesepakatan dengan pihak penyedia sesuai dengan HPS yang telah di sepakati dibawah harga yang tercantum dalam DPA-SKPD
3. Evaluasi Kinerja dalam capaian program, kegiatan, sub kegiatan digunakan sebagai salah satu komponen pada saat proses poenganggaran tahun berikutnya
4. Optimalisasi Tenaga pendukung Lainnya
5. Memanfaatkan Aset pemerintah daerah dalam beberapa kegiatan koordinasi
6. Efisiensi pada pengadaan PBJ, Negosiasi antara Pejabat Pengadaan terkait nilai kontrak

C. Prestasi/ Penghargaan

Pada tahun 2023 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar mendapatkan prestasi/ penghargaan berupa :

1. Peringkat Pertama OPD dengan Jumlah Rekomendasi Statistik Terbanyak 2022
2. Silver Winner kategori The Best Government Public Relations Jatim PRA Award 2023
3. Terbaik 5 Kategori Pemerintah Kabupaten/Kota SATU DATA (SATA) AWARD PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2023
4. Juara 2 Lomba Perangkat Daerah Terinovatif "Innovative Governmanet Award (IGA)" Kota Blitar Tahun 2023
5. Juara 3 Legal Drafting Award Tahun 2023 dengan Tema "Mewujudkan Penyusunan Produk Hukum Daerah yang Makin KEREN
6. Juara Program Religi Terbaik Kategori Radio dalam Anugerah Penyiaran Tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Timur
7. Implementasi UU No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik KOTA BLITAR sebagai MENUJU INFORMATIF TINGKAT KABUPATEN/KOTA – JAWA TIMUR
8. Berdasarkan KepMenpan RB Nomor 013 Tahun 2024 tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada Instansi Pusat Dan Pemerintah Daerah Tahun 2023 Pemerintah Kota Blitar mendapatkan predikat "Sangat Baik" dengan Indeks 3,68
9. Penghargaan SAKIP Tingkat Kota Blitar nilai sebesar 74.79 dengan predikat "BB" untuk SAKIP Dinas Kominfotik adalah peringkat 14 (empat belas) dengan predikat A.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2023 sebagai alat evaluasi untuk bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya. LKjIP juga disusun sebagai alat kendali, penilai kualitas kerja dan sebagai pendorong perwujudan *Good Governance*.

Dari hasil evaluasi terhadap kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar dapat disimpulkan bahwa Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dalam Renstra 2021-2026 maupun Renja 2023 dikategorikan sangat berhasil karena memperoleh capaian rata-rata 101,39% (*seratus satu koma tiga puluh Sembilan persen*).

Nilai tersebut berasal dari indikator sasaran pada Tujuan “Meningkatnya Pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik” dengan perincian sebagai berikut:

1. Indikator Sasaran 1 :

Persentase layanan publik online dan terintegrasi, nilai capaian kinerja sasaran sebesar 100% (*seratus persen*) masuk kategori sangat berhasil;

2. Indikator Sasaran 2 :

Nilai hasil monev PPID, nilai capaian kinerja sasaran sebesar 103% (*seratus tiga persen*) masuk kategori sangat berhasil;

3. Indikator Sasaran 3 :

Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan dan evaluasi pembangunan, nilai

capaian kinerja sasaran sebesar 103% (Seratus Tiga Persen) masuk kategori sangat berhasil;

4. Indikator Sasaran 4 :

Indeks KAMI, nilai capaian kinerja sasaran sebesar 100.6% (Seratus koma enam persen) masuk kategori sangat berhasil.

Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah nilai capaian kinerja sasaran sebesar 100.3% (Seratus koma tiga persen) masuk kategori sangat berhasil.

B. Tabel 4.1

Rencana Tindak Lanjut LKj IP Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar Tahun 2023

No	Langkah Perbaikan LKj IP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Timeline		
				Tahun 2024 (murni)	Tahun 2024 (perubahan)	Tahun 2025
1	Meningkatnya layanan SPBE melalui kebijakan dan tata kelola TIK	- Mensosialisasikan arsitektur proses bisnis dan layanan sistem elektronik sesuai indikator yang ada di SPBE. - Menyusun standar manajemen layanan mulai dari pelayanan pengguna hingga pengoperasian	- Program Aplikasi Informatika - Kegiatan Pengelolaan E-gov di lingkup Pemda Kab/Kota - Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Gov dalam penyelenggaraan Pemda Kab/Kota	√		

No	Langkah Perbaikan LKj IP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Timeline		
				Tahun 2024 (murni)	Tahun 2024 (perubahan)	Tahun 2025
		layanan tersebut. Sosialisasi standar teknis pengembangan aplikasi				
2	Meningkatnya Sistem Keterbukaan Informasi Publik	• Optimalisasi dukungan perangkat daerah dalam memberikan data pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. • Mengadakan rapat koordinasi dan monev atas hasil monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik oleh Komisi Informasi. • Himbauan kepada perangkat daerah untuk mengalokasikan anggaran keterbukaan informasi publik	- Program Informasi Komunikasi Publik - Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota - Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik	√		

No	Langkah Perbaikan LKj IP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Timeline		
				Tahun 2024 (murni)	Tahun 2024 (perubahan)	Tahun 2025
3	Meningkatnya Pemanfaatan Data Statistik Daerah	• Pendampingan Pengolahan Data Statistik Sektoral pada Perencanaan pembangunan dan Evaluasi pembangunan pada perangkat daerah. • Memberikan rekomendasi dan analisis pada perangkat daerah yang menangani perencanaan dan evaluasi.	- Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral - Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota - Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	√	√	√
4	Meningkatnya Keamanan Informasi.	• Pendampingan dan Asistensi Indeks KAMI dan Manajemen Risiko SPBE perangkat daerah yang menjadi objek penilaian yang memperoleh nilai rendah. • Memberikan rekomendasi pada perangkat daerah yang menjadi sasaran	- Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi - Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota - Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan	√	√	√

No	Langkah Perbaikan LKj IP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Timeline		
				Tahun 2024 (murni)	Tahun 2024 (perubahan)	Tahun 2025
		penilaian Indeks KAMI	Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik			
5	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	- Memanfaatkan teknologi informasi dalam pengumpulan data kinerja - Memanfaatkan hasil monitoring dan evaluasi pengukuran kinerja untuk penyesuaian (refocusing) organisasi, penyesuaian kebijakan, strategi, dan penyesuaian kebijakan dalam mencapai kinerja - Memanfaatkan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja, mendukung efektivitas dan	- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota - Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	√		

No	Langkah Perbaikan LKj IP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Timeline		
				Tahun 2024 (murni)	Tahun 2024 (perubahan)	Tahun 2025
		efisiensi kinerja, perbaikan dan peningkatan				

Demikian beberapa hal yang dapat disampaikan pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjiP) Tahun 2023 , semoga dapat memberikan gambaran tentang pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar. Semoga dokumen LKjiP ini dapat berguna bagi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar khususnya sebagai evaluasi untuk perbaikan di masa depan, serta bagi segenap pihak yang berkepentingan.

LAMPIRAN I

MATRIK RENCANA STRATEGIS

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA BLITAR 2021-2026

VISI : KOTA BLITAR KEREN, Unggul, Makmur, dan Bermartabat

MISI : 5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi

TUJUAN					SASARAN					CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN		K E T
URAIAN	INDIKAT OR	FORMULA SI PERHITUN GAN	KON DISI AWA L 2020	TA RG ET 20 23	URAIAN	INDIKAT OR	FORMULAS I PERHITUN GAN	KON DISI AWA L 2020	TA R G ET 20 23	STRATE GI	ARAH KEBIJAKAN	
Meningka tnya Pengemba ngan Sistem Pemerinta han Berbasis	Indeks Pemerint ahan Berbasis Elektroni k (SPBE)	(Bobot x DomainKeb ijakan SPBE) + (Bobot x Domain Tata Kelola SPBE) +	2,88	2,8 2	Meningk atnya Sistem Keterbuk aan Informasi Publik	Nilai Hasil Monev PPID	Pemeringka tan monev Keterbukaa n informasi publik (Berdasarka n Perki 5	71	86	Peningk atan Sistem keterbu kaan informas i publik	Optimalisasi kemudahanak ses publik terhadap aspirasi, data dan informasi publik melalui sistem	U ru sa n K o m u

Elektronik		(Bobot x Layanan SPBE)					Tahun 2016)				elektronik Optimalisasi pengelolaan konten dan media komunikasi publik optimalisasi kemitraan dengan pemangku kepentingan	nikasi dan informasi masi
					Meningkatnya Layanan SPBE Melalui Kebijakan dan Tata Kelola TIK	Persentase layanan publik online dan terintegrasi	Jumlah Layanan publik online dan terintegrasi/ Jumlah layanan publik x 100 %	81	94	Penguatan layanan SPBE melalui kebijakan dan tata kelola TIK	Optimalisasi dan menguatkan infrastruktur jaringan Optimalisasi administrasi pemerintah dan publik berbasis elektronik yang terintegrasi	Urusan Bidang administrasi Komin

												k a s i d a n i n f o r m a s i
					Meningkatnya pemanfaatan data statistik daerah	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan dan	Jumlah OPD yang menggunakan data statistik utk perencanaan dan evaluasi pembangunan/ jumlah OPD X 100%	94,83	97	Peningkatan pemanfaatan data statistik daerah	Optimalisasi integrasi satu data berbasis elektronik Optimalisasi ketersediaan data statistik sektoral	U r u s a n S t a t i s t i k

						evaluasi pembang unan						
					Meningk atnya Keamana n Informasi	Indeks KAMI	Jumlah nilai per area keamanan informasi/J umlah area penilaian x 100 %	20,3 1	46 ,5 1	Peningk atan keaman an informas i menerap kan sertifikat elektroni k pada sistem informas i layanan administ rasi pemerin tah dan publik	Optimalisasi penerapan sertifikat elektronik pada sistem informasi layanan administrasi pemerintah dan publik Optimalisasi peran dan kapasitas Gov- CSIRT	U ru sa n Pe rs a n di a n

										Optimalisasi peran dan kapasitas Gov-CSIRT		
					Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Kategori SAKIP PD berdasarkan evaluasi/penilaian dari Inspektorat Daerah Kota Blitar	83,03	85	Peningkatan kinerja pelayanan perangkat daerah	Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran perangkat daerah berbasis kinerja Meningkatkan kenyamanan kantor agar tercipta lingkungan kerja yang kondusif	Urusan Komunitas dan informasi

LAMPIRAN II

RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2023
DINAS KOMUNIKASI , INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA BLITAR

SASARAN			PROGRAM				KEGIATAN				KEGIATAN			
UR AIA N	IND IKA TOR	T A R G E T	URAI AN	INDI KAT OR PRO GRAM	T A R G E T	AN GG AR AN	URA IAN	IND IKA TOR KE GIAT AN	T A R G E T	AN GG AR AN	URAIA N	INDIKAT OR SUBKEGI ATAN	TAR GET	AN GG AR AN
Me nin gka tny a lay ana n SPB E mel alui keb	Per sen tas e lay ana n pub lik onli ne dan teri	9 8 %	PROG RAM APLI KASI INFO RMAT IKA	Pers enta se pene rapa n siste m elek tron ik dala m	9 2, 8 9 %	5.7 00. 316 .31 0	Peng elola an Nam a Dom ain yang tela h ditet apka m	Pre sen tas e pen era pan do mai n go.i d / sub	1 0 0 p er se n	4.9 65. 478 .79 9	Pendaft aran Nama Domain Pemer intah Kabupa ten/Kot a	Jumlah Pendaftar an Nama Domain Pemerinta h Kabupate n/Kota	6 dom ain	27. 806 .12 4

ijak an dan tata kel ola TIK	nte grit asi			laya nan publ ik			oleh Pem erin tah Pusa t dan Sub Dom ain di Ling kup Pem erin tah Daer ah Kab upa pate n / Kota	do mai an pad a apli kas i ad min istr asi pe mer int aha n dan lay ana n pub lic ses uai atu ran							
--	--------------------	--	--	---------------------------	--	--	---	---	--	--	--	--	--	--	--

											Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2 dokumen	49.999.880
											Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	20 unit	4.887.672.795

							Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Presentase kedisiplinan pemerintahan dan layanan publik	96 persen	734.837.511	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E - Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	47.383.000
											Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran	1 Dokumen	12.060.000

											Berbasi s Elektro nik	Pemerinta han Berbasis Elektroni k		
											Pengelo laan Pusat Data Pemer intahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerinta han Daerah yang Dikelola	1 unit	9.1 98. 600
											Penyele nggara an Sistem Komuni kasi Intra Pemer intah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyeleng garaan Sistem Komunik asi Intra Pemerinta h Daerah	1 Dok ume n	143 .68 0.0 00

											Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	1 dokumen	35.300.000
											Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	I PD	12.585.000
											Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintah	2 unit	238.928.611

											Pemerintahan Berbasis Elektronik	han Berbasis Elektronik yang Dikembangkan		
											Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	2 layanan	8.184.000
											Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	2 dokumen	34.891.000

											Kota Cerdas			
											Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	183.724.300
											Pengelolaan Government Chief Information	Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Informati	1 Dokumen	8.903.000

											Officer (GCIO)	on Officer (GCIO)		
Meningkatnya sistem keterbukaan informasi publik	Nilai Hasil Monitoring PPI D	91	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase dissemination layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strat	90%80%	2.540.944.000	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyediaan informasi	57%	2.540.944.000	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	2 dokumen	27.120.000

				egi kom unik asi (STA RKO M) dan SOP yang Dite tapk an Pers enta se kom unit as mas yara kat /mit ra strat egis pem erin taha n			pub lik						
--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--

				daerah yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintahan daerah										
	Persentase Tingkat Tindak Lanjut Pen	100%									Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	4 dokumen	14.027.400

	g ad uan Mas yar aka t													
											Monitor ing Informa si dan Peneta pan Agenda Priorita s Komuni kasi Pemer intah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Monitorin g Informasi dan Penetapa n Agenda Prioritas Komunik asi Pemerinta h Daerah	12 dok ume n	6.3 70. 134
											Pengelo laan Konten dan Perenca naan Media Komuni	Jumlah Dokumen Hasil Pengelola an Konten dan Perencan aan	520 dok ume n	188 .87 7.2 40

											kasi Publik	Media Komunik asi Publik		
											Pengelo laan Media Komuni kasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksana an Pengelola an Media Komunik asi Publik	11 dok ume n	507 .82 6.4 40
											Pelayan an Informa si Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	12 Dok ume n	513 .61 6.7 60
											Layana n Hubun gan Media	Jumlah Layanan Hubunga n Media	110 0 laya nan	921 .93 0.0 26

											Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	1 Dokumen	275.361.400
											Manajemen Komunikasi Krisis	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Manajemen Komunikasi Krisis	1 dokumen	3.624.500
											Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	30 orang	38.761.800

											Penyele nggara an Hubun gan Masyar akat, Media dan Kemitra an Komuni tas	Jumlah Dokumen Kemitraa n dengan Masyarak at, Media dan Komunita s dalam Mendisem inasikan Informasi Program atau Kebijakan	80 dok ume n	43. 428 .30 0
Me nin gka tny a per ma nfa ata n dat a stat isti k	Per sen tas e OP D yan g me ngg una kan dat a stat	9 8 %	PROG RAM PENY ELEN GGAR AAN STATI STIK SEKT ORAL	Pers enta se Data stati stik yang terp ubli kasi men gg u nak an siste	9 6, 7 1 %	340 .83 8.7 00	Pen yele ngga raan Stat istik Sekt oral di Ling kup daer ah Kab upat	Pre sen tas e sur vey stat isti k sek tor al yan g me	1 0 0 %	340 .83 8.7 00	Koordin asi dan Sinkro nisasi Pengu mpulan , Pengola han, Analisis dan disemin asi Data	Jumlah Dokumen Koordinas i dan Sinkronis asi Pengump ulan, Pengolaha n, Analisis dan Disemina si Data	3 dok ume n	211 .84 5.3 00

daerah	istilah dalam menyusun perencanaan pembangunan dan evaluasi pembangunan		melekttronik			en/Kota	ndapat rekomendasi dari BPS			Statistik Sektoral 1	Statistik Sektoral		
--------	---	--	--------------	--	--	---------	-----------------------------	--	--	----------------------	--------------------	--	--

	Indeks IPS	2,7									Peningkatan kapasitas SDM Pemda dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	10 orang	27.837.500
											Memangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	4 dokumen	26.060.000
											Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik	4 orang	55.987.300

											k Sektora 1	Sektoral dari BPS		
											Pengem bangan Infrastr uktur	Jumlah Infrastruk tur Statistik	1 unit	14. 887 .30 0
											Penyele nggara an Otorisa si Statisti k Sektora 1 di Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral yang Dihimpun	1 dok ume n	4.2 21. 300
Me nin gka tny a Kea ma	Ind eks KA MI	5 4, 2 6 %	PROG RAM PENY ELEN GGAR AAN PERS	Pers enta se impl eme ntas i	6 4, 2 6 %	256 .28 3.0 00	Pen yele ngga raan Pers andi an	Kep atu han OP D ter had	5 4, 2 6 %	165 .20 3.0 00	Peneta pan Kebijak an Tata Kelola Keama	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamana n Informasi	1 dok ume n	75. 400 .00 0

nan Info rma si			ANDI AN UNTU K PENG AMAN AN INFO RMAS I	Pers andi an Unt uk Pen gam ana n Info rma si Pem erin tah Daer ah Kab upat en/ Kota			untu k Peng ama nan Info rma si Pem erin tah daer ah Kab upat en/ Kota	ap pen era pan per san dia n unt uk pen ga ma nan info rma si pe mer ints h dae rah kab /ko ta			nan Informa si dan Jaring Komuni kasi Sandi Pemer intah Daerah Kabupa ten/Kot a	dan Jaring Komunik asi Sandi Pemerinta h Daerah Kabupate n/Kota yang Ditetapka n		
--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	---	---	--	--

											Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	4 laporan	49.608.000
											Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah	2 laporan	24.965.000

											ten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik		
											Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	20 PD	15.230.000
							Peneptan Pola Hubungan	Persentase penerapan	50,00%	91.080.000	Operasionalisasi Jaringan Komunikasi Sandi	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaringan	40 PD	91.080.000

							Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	pol a hubungan komunikasi sandi			Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Komunikasi Sandi		
Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	84	5.238.213.036	Pencapaian, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	Persentase dokumen perencanaan dan pelapo	100%	20.139.150	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11 dokumen	5.239.150

			N /KOTA				ngka t Daerah	ran yan g tepat waktu dan sesuai standart						
											Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian	7 laporan	10.000.000

												Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
											Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 laporan	4.900.000
							Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat	100%	3.994.465.046	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	13 Orang/Bulan	3.987.165.046

								daerah sesuai standar						
											Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	4 laporan	7.300.000

							Adm inist rasi Kep ega waia n Pera ngka t Daer ah	Per sen tas e pel aya nan ad min istr asi kep ega wai an per ang kat dae rah yan g ses uai sta nda r	1 0 0 %	116 .90 0.8 00	Pengad aan Pakaia n Dinas beserta Atribut Kelengk apanny a	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengka pan	65 pak et	24. 790 .40 0
--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	-------------------------	--	--	-----------------	------------------------

											Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	68 orang	92.110.400
							Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah	100%	296.515.100	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket	9.700.000

											Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 paket	13.012.100
											Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 paket	27.000.000
											Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	36 paket	51.125.000

											Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	5.800.000
											Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan yang Disediakan	24 dokumen	4.000.000
											Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 laporan	185.878.000

							Pen yedi aan Jasa Pen unja ng Urus an Pem erin taha n Daer ah	Per sen tas e pen yed iaa n jasa pen unj ang uru san ses uai sta nda rt	1 0 0 %	555 .38 9.0 00	Penyedi aan Jasa Komuni kasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaa n Jasa Komunik asi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediaka n	36 Lap oran	320 .00 0.0 00
											Penyedi aan Jasa Pelayan an Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaa n Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediaka n	13 lapo ran	235 .38 9.0 00

							Pem elih araa n Bara ng Mili k Daer ah Pen unja ng Urus an Pem erin taha n Daer ah	Per sen tas e BM D yan g ter peli har a ses uai sta nda rt	1 0 0 %	254 .80 3.9 40	Penyedi aan Jasa Pemelih araan, Biaya Pemelih araan, Pajak dan Perizin an Kendar aan Dinas Operasi onal atau Lapang an	Jumlah Kendaraa n Dinas Operasion al atau Lapangan yang Dipelihar a dan dibayarka n Pajak dan Perizinan nya	8 unit	97. 303 .94 0
											Pemelih araan Peralat an dan Mesin Lainny a	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihar a	9 unit	90. 000 .00 0

											Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit	1 unit	67.500.000
											Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	

											Pengad aan Barang Milik Daerah Penunj ang Urusan Pemer intahan Daerah		100 pers en	
											Pengad aan Peralat an dan Mesin Lainny a	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediaka n	3 unit	
											Pengad aan Sarana dan Prasara na Penduk ung Gedung Kantor	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Penduku ng Gedung Kantor atau	6 unit	

											atau Bangun an lainnya	Banguna n Lainnya yang Disediaka n		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------------------	---	--	--

LAMPIRAN III

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA BLITAR



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUJIANTO, S.Sos, M.Si

Jabatan : KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
KOTA BLITAR

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. SANTOSO, M.Pd

Jabatan : Walikota Blitar

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Blitar, 2 Oktober 2023

KEPALA DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA DAN STATISTIK
KOTA BLITAR Kota Blitar


MUJIANTO, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 197202141992011003

Walikota Blitar,


Drs. SANTOSO, M.Pd

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
KOTA BLITAR**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya sistem keterbukaan informasi publik	Nilai Hasil Monev PPID	86.00(Nilai)
2	Meningkatnya layanan SPBE melalui kebijakan dan tata kelola TIK	Persentase layanan publik online dan terintegritasi	94.00(Persen)
3	Meningkatnya pemanfaatan data statistik daerah	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan dan evaluasi pembangunan	97.00(Persen)
4	Meningkatnya Keamanan Informasi	Indeks KAMI	46.51(Indeks)
5	Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85.00(Nilai)

No	Program	Anggaran (Rp.)	Keterangan
1	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	6,372,423,052.00	Pendapatan Bagi Hasil
2	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2,418,788,250.00	Pendapatan Bagi Hasil
3	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	331,596,642.00	Pendapatan Bagi Hasil
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	183,560,732.00	Pendapatan Bagi Hasil
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5,105,687,323.00	Pendapatan Bagi Hasil

Blitar, 2 Oktober 2023


 Walikota Blitar,
Drs. SANTOSO, M.Pd


 KEPALA DINAS KOMUNIKASI,
 INFORMATIKA DAN STATISTIK
 KOTA BLITAR Kota Blitar
MUJIANTO, S.Sos, M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 197202141992011003

PENGUKURAN KINERJA

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA BLITAR 2023

Sasaran/Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Formulasi perhitungan	Kinerja			Program	Anggaran		
			Tar get	Realis asi	% Capai an		Alokasi	Realisasi	% Capaian
Meningkatnya layanan SPBE melalui kebijakan dan tata kelola TIK	Persentase layanan publik online dan terintegrasi	Jumlah Layanan publik online dan terintegrasi / Jumlah layanan publik x 100 %	94 %	94%	100%	Program Aplikasi Informatika	6.372.423.052,00	6.326.902.220,00	99,29

Meningkatnya sistem keterbukaan informasi publik	Nilai Hasil Monev PPID	Pemeringkatan monev Keterbukaan informasi publik (Berdasarkan Perki 5 Tahun 2016)	86	88,69	103%	Program Informasi Komunikasi Publik	2.418.788.250,00	2.394.622.618,00	99,00
Meningkatnya pemanfaatan data statistik daerah	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan dan evaluasi pembangunan	Jumlah OPD yang menggunakan data statistik utk perencanaan dan evaluasi pembangunan/ jumlah OPD X 100%	97 %	100%	103%	Program penyelenggaraan Statistik	331.596.642,00	328.282.240,00	99,00

Meningkatnya Keamanan Informasi	Indeks KAMI	Jumlah nilai per area keamanan informasi/Jumlah area penilaian x 100 %	46,51	46,8	101%	Program penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan Informasi	183.560.732,00	183.184.976,00	99,80
Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah oleh Inspektorat	85	85,27	100%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.105.687.323,00	4.969.185.948,00	97,33

LAMPIRAN IV



Dinas Komunikasi, Informatika
dan Statistik Kota Blitar

Pemerintah Kota Blitar